

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada masa pemerintahan Kevin Rudd dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut di antaranya adalah kebijakan Operasi Relex pada periode pertama kepemimpinan, yang dikenal dengan kebijakan “yang lebih kasih” terhadap pengungsi dan pencari suaka dan kebijakan PNG Solution yang bekerja sama dengan Papua New Guinea sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan Penataan Pemukiman Daerah (Regional Resettlement Arrangement) pada periode yang kedua.

Kebijakan PNG Solution ini merupakan kebijakan yang keras terhadap pengungsi dan pencari suaka, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan isi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan konvensi hak asasi manusia lainnya dalam hal perlindungan pengungsi yang mencari suaka, serta jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental bagi pengungsi tanpa diskriminasi atau hukuman. Tidak hanya itu, kebijakan ini tidak melewati prosedural suaka tertentu bagi pencari suaka yang akan mencari suaka di Australia. Pengungsi yang dimukimkan kembali di Papua New Guinea akan menghadapi masa depan dengan standar perlindungan hak asasi yang lebih rendah daripada apa yang akan mereka

dapatkan jika dipindahkan ke Australia, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesejahteraan.

Dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Australia mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Dari faktor internal dan eksternal yang disebutkan dalam hipotesis, faktor internal lebih dominan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Sementara faktor eksternal, tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Faktor internal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut di antaranya adalah faktor perspektif aktor yang dipengaruhi oleh partai pendukung Kevin Rudd yaitu Partai Buruh, karakteristik situasional Australia dalam pengambilan kebijakan, dan formasi opini publik Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Hal ini menunjukkan bahwa, suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan tidak selalu dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal. Faktor internal dari dalam negara sendiri sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengeluarkan kebijakan.

#### **4.2. Saran**

Penelitian dengan judul “**Kebijakan PNG Solutions dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Periode Kevin Rudd**” ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam hal metode pengumpulan data. Penelitian dilakukan hanya melalui telaah dokumen berupa buku, jurnal, laporan, konvensi internasional dan berita. Hal ini disebabkan karena, subjek yang akan dimintai keterangan seperti UNHCR di Canberra dan IOM Australia tidak dapat memberikan data atau keterangan yang diminta oleh penulis guna pengembangan

penelitian, karena organisasi tersebut tidak dapat membantu penelitian yang dilakukan oleh individu. Jadi, penelitian ini hanya menggunakan dokumen berupa buku, jurnal, laporan, konvensi internasional dan berita online. Harapannya, penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode pengumpulan data yang lain untuk mendapatkan bukti yang lebih valid. Selain itu, penulis juga tidak membahas sejauh mana keefektifan dari kebijakan PNG Solution ini dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Penelitian berikutnya, disarankan untuk membahas keefektifan dari penetapan kebijakan PNG Solution tersebut, dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia.

Penulis juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti dari sisi yang berbeda yaitu dari sudut pandang Papua New Guinea, alasannya mau melakukan kerja sama dengan Australia mengingat keadaan domestik Papua New Guinea yang berbeda dengan Australia dalam hal pelaksanaan kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati bersama kedua negara.